

**SINERGITAS PEMERINTAH, DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT SIPIL  
(*CIVIL SOCIETY*) MELALUI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)  
DALAM PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA CILEGON**

Oleh :

**Ipah Ema Jumiati**

[ema.umar@gmail.com](mailto:ema.umar@gmail.com)

Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Jakarta Km 4 Serang

**Abstrak** :Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat Sipil (*Civil Society*) Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon merupakan komitmen bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Sinergitas ini akan berguna untuk membantu perusahaan dalam memperbaiki *financial performance* dan akses pada modal, meningkatkan *corporate image* dan penjualan/layanan jasa, memelihara kualitas kerja, memperbaiki keputusan pada isu-isu kritis, serta menangani resiko secara lebih efisien dan mengurangi biaya jangka panjang. Dengan dukungan berbagai *stakeholder* pada ranah ekonomi, sosial dan lingkungan, yang diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan. Sumber pendanaannya dihasilkan dari kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil (*civil society*) berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dibangun bersama, untuk kepentingan ke depan dalam jangka panjang yang lebih baik. Sebagai outputnya adalah pemberdayaan masyarakat Cilegon dalam pengentasan kemiskinan melalui kerangka *good corporate governance*.

**Kata Kunci** : Sinergitas, CSR, Pengentasan, Kemiskinan.

Perubahan sosial ekonomi dan budaya perusahaan adalah meminimalkan merupakan proses alamiah yang tidak kontribusi dampak negatif dan bisa dihentikan. Tanggung jawab memaksimalkan dampak positif dari

perusahaan tersebut. Berperilaku bisnis secara mulia, jujur, adil, dan bertanggungjawab adalah kewajiban untuk menjaga eksistensi perusahaan agar diterima dengan baik dalam rantai bisnisnya. Namun, saat ini hal tersebut belum cukup bagi perusahaan. Perusahaan semakin menyadari bahwa CSR diperlukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kepentingan *stakeholder*.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau yang lebih sering disebut *corporate social responsibility* (CSR), bukan lagi berada dalam tataran wacana sebagaimana beberapa tahun ke belakang, atau bentuk kegiatan amal dan respons atas kejadian luar biasa semata. CSR di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat, dimana sudah menjadi unsur penting bagi perusahaan dalam menjamin keberlanjutan bisnisnya, maupun bagi pemangku kepentingan lain sebagai bentuk tanggung jawab atas sebuah dampak operasional.

Terdapat dua indikator yang menunjukkan, bahwa CSR telah memiliki kedudukan penting. *Pertama*,

pada beberapa perusahaan multinasional, nasional, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), CSR sudah menjadi departemen/divisi mandiri yang secara struktur organisasi bertanggung jawab langsung kepada direktur atau CEO. Hal ini menunjukkan bahwa CSR bukan lagi pelengkap/tempelan pada departemen lain, atau divisi yang baru dibentuk jika memperingati ulang tahun perusahaan maupun ketika ada kejadian luar biasa (*force major*), seperti konflik masyarakat atau bencana yang disebabkan dampak operasional.

*Kedua*, regulasi terkait CSR juga semakin berkembang, mulai dari Keputusan Menteri BUMN, Undang-Undang Perusahaan Terbatas (PT), Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Minyak dan Gas bumi, serta *guidance* ISO 26000. Dalam era otonomi daerah beberapa Kabupaten/Kota dan Provinsi juga gencar menerbitkan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan dan peruntukkan dana CSR. Kondisi tersebut, menjadi tantangan bagi perusahaan untuk menjalankan CSR secara professional, sehingga CSR

memberikan kontribusi positif multipihak, bukan ada tiada CSR tidak memberikan pengaruh.

Sebagai implikasi dari dua indikator di atas dengan mencermati perdebatan dan polemik tentang konsepsi serta konsekuensi formalisasi CSR selama ini, menimbulkan beberapa permasalahan antara lain : *pertama*, karena perbedaan pemahaman mengenai konsepsi CSR oleh para pelaku bisnis, pemerintah, DPR/DPRD, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. *Kedua*, Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan dari sejumlah asosiasi pengusaha dan perusahaan untuk mencabut Pasal 74 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), CSR menjadi kewajiban perseroan. Permasalahannya, paradigma bisnis dari kebanyakan pengusaha, pelaku bisnis, atau perusahaan di Indonesia masih konservatif dan pragmatis. Mereka sebenarnya belum siap menerima CSR sebagai suatu kewajiban perseroan dan menginternalisasikannya ke dalam praktik bisnis secara berkelanjutan. Mereka masih menganggap CSR

sebagai suatu beban yang merugikan kepentingan perusahaan dan pemilik. Apabila paradigma konservatif tersebut tidak segera dicerahkan, “pemaksaan” CSR bakal menimbulkan konflik kepentingan dan komplikasi masalah yang serius yang justru akan merugikan dunia usaha, pemerintah, masyarakat dan lingkungan, serta perekonomian nasional.

*Ketiga*, CSR sudah menjadi isu global yang mendapat perhatian luas dari kalangan pelaku pasar, para kepala negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa, lembaga-lembaga keuangan dan bisnis internasional, serta yang lainnya. Munculnya *Global Compact*, *Global Reporting Inisiatives* (GRI), dan ISO 26000 tentang CSR menunjukkan bahwa CSR menjadi isu krusial serta agenda bisnis global yang harus mendapat perhatian serius dari pelaku bisnis dan dunia usaha. Kebanyakan pelaku bisnis dan perusahaan di Indonesia masih belum menyadari hal itu karena berbagai sebab. *Keempat*, diwajibkannya CSR sebagai kewajiban perseroan dan mulai responsifnya sejumlah pelaku bisnis (perusahaan) terhadap isu-isu CSR tentu saja

membawa implikasi dan konsekuensi serius bagi akuntansi dan profesi akuntan. Aspek ini berhubungan dengan aspek akuntansi manajemen CSR dan pelaporan CSR dalam pelaporan perusahaan, yang menunjukkan bahwa CSR berkorelasi erat dan berpengaruh positif secara signifikan terhadap profitabilitas serta nilai perusahaan.

Sehubungan dengan beberapa permasalahan di atas, penulis mendapati kesamaan persoalan dalam implementasi CSR di Kota Cilegon yang dikelola oleh pihak ketiga yaitu *Cilegon Corporate Social Responsibility* (CCSR) yang setelah terbentuk melalui Peraturan Walikota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Tata Kerja CCSR di Kota Cilegon dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Cilegon Nomor 460.05/Kep.83-Org/2011 tentang Penetapan Dewan Pengawas dan Pengurus CCSR Periode Tahun 2011-2013, pada Tahun 2011 menitik beratkan pada program-program pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu tujuan utama yang ingin dicapai melalui CSR.

Secara umum Cilegon memiliki penduduk sebanyak 385.720 orang, yang terdiri atas laki-laki sebanyak 197.230 orang, dan Perempuan sebanyak 188.490 orang (**sumber** : Cilegon dalam angka, 2012) ini memiliki potensi yang luar biasa. Potensi yang terbesar yaitu potensi perindustrian, Pelabuhan dan Pariwisata. Seperti yang diketahui, Cilegon telah dikenal dengan Kota Industri, dimana sebagian dari wilayahnya diperuntukkan untuk perindustrian. Terdapat 344 Perseroan Terbatas (Sumber : Disperindagkop Kota Cilegon, 2011). Adapun jumlah Industri Besar yang terdata pada CCSR sebanyak 39. Namun yang tergabung dalam keanggotaan CCSR hanya 3 (tiga) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Mandiri, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cilegon, PD Pelabuhan Cilegon Mandiri), 5 (lima) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (PT. ASDP Merak, PT. Indonesia Power, PT. Krakatau Steel, PT. Pelindo 2) dan 1 (satu) lembaga perbankan yaitu Bank Jabar Cilegon (Sumber: Divisi Keuangan dan Pelaporan CCSR Cilegon, 2012).

Selain wilayah perindustrian Cilegon juga dikenal dengan Kota transit, karena di Cilegon terdapat pelabuhan besar yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Sumatera yang keberadaannya di Merak. Pelabuhan lain juga terdapat di Ciwandan, namun pelabuhan tersebut dikhususkan untuk angkutan *general cargo*/barang (untuk kapal asing) yang pengelolaannya di pegang oleh Pelindo.

Potensi Cilegon lainnya yaitu di bidang pariwisata. Kota Cilegon memiliki beberapa obyek wisata dan rekreasi yang cukup berarti dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Kota dan pengembangan wilayah, diantaranya :

1. Wisata bangunan bersejarah berupa cagar budaya.
2. Wisata bahari di Pulaorida, Pulau Merak Kecil dan Pantai Merak sampai dengan Suralaya di Kecamatan Pulomerak
3. Wisata industri di Kawasan PLTU Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak dan Kawasan Industri di Kecamatan Citangkil dan Ciwandan; serta

4. Obyek rekreasi lainnya seperti kampung wisata di Cipala Kecamatan Pulomerak.

Kota Cilegon terdiri atas 8 (delapan) Kecamatan; yaitu 1) Kecamatan Cilegon; 2) Kecamatan Jombang; 3) Kecamatan Grogol; 4) Kecamatan Purwakarta; 5) Kecamatan Ciwandan; 6) Kecamatan Citangkil; 7) Kecamatan Pulomerak; dan 8) Kecamatan Cibeber. Potensi-potensi yang ada tersebut seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, minimalnya dapat mengurangi persoalan-persoalan kemiskinan di Kota Cilegon. Apalagi Cilegon adalah Kota kecil karena luas wilayah Kota Cilegon hanya 175.50 Km<sup>2</sup>. Sehingga Pemerintah dapat lebih mudah untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan berbagai persoalan kemiskinan yang dialami. Namun, dalam kenyataannya Kota Cilegon masih tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan.

Adapun data yang menunjukkan kemiskinan di Kota Cilegon dapat digambarkan melalui Tabel 1.1., berikut :

**Tabel 1.1**  
**Kemiskinan di Kota Cilegon tahun 2009-2011**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin ( Dari 383.854 )
2009	16.979
2010	15.961
2011	15.961

**Sumber** : Petunjuk Teknis Bantuan Masyarakat Langsung (BML) Kota Cilegon, 2011.

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya penduduk yang miskin di daerah industri. Dilihat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 jumlah penduduk miskin hanya mengalami penurunan sebanyak 1.018 penduduk dari jumlah penduduk Kota Cilegon sebesar 383.854. Salah satu asumsinya adalah bahwa penurunan angka kemiskinan tersebut disebabkan pada tahun tersebut, Cilegon telah memberlakukan program-program penanggulangan kemiskinan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan

Masyarakat Langsung (BML), Program 1 Milyar 1 Kecamatan, Program P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera), Program *Cilegon Corporate Social Responsibility (CCSR)*, dan lain-lain. Selain data kemiskinan yang bersumber dari petunjuk teknis Bantuan Masyarakat Langsung (BML) Kota Cilegon, data yang mendukung adanya angka kemiskinan di Kota Cilegon adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, yaitu :

**Tabel 1.2.**

**Kemiskinan di Kota Cilegon tahun 2009-2011**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin</b>
2009	15.367
2010	16.800
2011	15.453

**Sumber :** Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, 2012

Dari tabel 1.2. tersebut menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 sebesar 15.367 menjadi 16.800 di tahun 2010. Kenaikan itu disebabkan antara lain karena pada tahun tersebut di Indonesia sedang mengalami lonjakan kenaikan harga bahan pangan, sehingga daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi rendah. Walaupun demikian, dengan banyaknya program

penanggulangan kemiskinan di Cilegon, di tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Cilegon mengalami penurunan ke angka 15.453 atau sebesar 3,98 persen.

Namun, diantara 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten, Kota Cilegon adalah Kota yang memiliki jumlah kemiskinan yang rendah. Hal itu dapat digambarkan pada tabel 1.3., berikut :

**Tabel 1.3.****Jumlah Pendapatan Asli Daerah dan Kemiskinan di Kota/Kabupaten se-Provinsi Banten**

<b>Kota/ Kabupaten</b>	<b>2009</b>		<b>2010</b>		<b>2011</b>	
	<b>PAD (Milyar)</b>	<b>Kemiskinan</b>	<b>PAD (Milyar)</b>	<b>Kemiskinan</b>	<b>PAD (Milyar)</b>	<b>Kemiskinan</b>
Pandeglang	82.800	140.261	936.180	127.800	952.649	117.644
Lebak	823.089	142.229	955.534	125.200	1.111.410	115.160
Tangerang	1.922.811	256.151	1.638.706	89.200	1.209.035	82.047
Serang	909.125	82.897	949.390	89.200	1.846.947	82.047
Kota Tangerang	1.182.823	106.102	1.358.921	124.300	1.433.096	114.333
<b>Cilegon</b>	<b>640.263</b>	<b>15.367</b>	<b>685.599</b>	<b>16.800</b>	<b>781.047</b>	<b>15.453</b>
Kota Serang	265.004	32.764	517.574	40.700	563.649	37.436
Tangerang Selatan		-	918.193	21.900	1.175.314	20.144
Jumlah	6.564.915	775.791	7.960.097	751.000	9.055.147	690.874

**Sumber :** Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, 2012

Berdasarkan data pada Tabel 1.3. di atas, dapat diketahui bahwa terjadi fluktuasi dari angka kemiskinan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang diperoleh masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Dalam hal ini Cilegon merupakan daerah yang PAD-nya terendah kedua diantara daerah lainnya.

Kemudian yang menjadi salah satu sasaran dari program Cilegon *Corporate Social Responsibility* (CCSR) adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kota Cilegon berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon, sebagai berikut :

**Tabel 1.4.**

**Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Per-Kecamatan Di Kota Cilegon**

**Tahun 2009-2011**

Kecamatan	Jumlah RTS		
	2009	2010	2011
Ciwandan	2.884	2.758	2.758
Citangkil	4.050	2.298	2.298
Pulomerak	2.697	2.205	2.205
Purwakarta	2.162	1.396	1.396
Grogol	1.763	1.907	1.907
Cilegon	1.909	1.650	1.650
Jombang	3.198	2.073	2.073
Cibeber	2.239	1.676	1.676
Jumlah	20.902	15.961	15.961

**Sumber :** Cilegon Dalam Angka tahun 2009-2011

Dari tabel 1.4. tersebut, Kecamatan yang memiliki jumlah RTS terbanyak di tahun 2009 adalah Kecamatan Citangkil dengan jumlah RTS 4.050, kemudian Kecamatan Jombang dengan 3.198 RTS, Ciwandan 2.884, Pulomerak 2.697, Cibeber 2.239, Purwakarta 2.162, Cilegon 1.909, yang paling sedikit adalah Kecamatan Grogol dengan jumlah RTS 1.763. Pada tahun 2010, jumlah RTS di semua Kecamatan

mengalami perubahan. Dan yang Kecamatan yang terbanyak menjadi Kecamatan Ciwandan dengan jumlah RTS sebanyak 2.758, kemudian Citangkil dengan 2.298, Pulomerak 2.205, Jombang 2.073, Grogol 1.907, Cibeber 1.676, Cilegon 1.650, dan yang paling sedikit jumlah RTSnya yaitu Purwakarta dengan 1.396 RTS. Kenaikan jumlah RTS terjadi pada Kecamatan Grogol yang pada tahun 2009 jumlah RTS sebanyak 1.763

menjadi 1.907 di tahun 2010. Dan di tahun 2011, jumlah RTS di semua Kecamatan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Hal tersebut dikarenakan data yang digunakan untuk tahun 2011 menggunakan data di tahun 2010. Sehingga tidak terlihat adanya kenaikan ataupun penurunan.

Dengan melihat berbagai fenomena di atas, Kota Cilegon kiranya perlu berbenah diri dengan spirit CCSR-nya yang berusaha membangun kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat di Kota Cilegon sebagai pertanggungjawaban moral dan etika pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat Sipil (*Civil Society*) Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Program

Pengentasan Kemiskinan Di Kota Cilegon ?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Sinergitas dalam *Good Governance*

Seiring dengan arus globalisasi, di awal dekade Sembilan puluhan telah lahir pendekatan, teori atau paradigma baru dalam **administrasi negara**. Banyak cendekiawan kontemporer dalam administrasi negara menggunakan istilah *governance* sebagai istilah lain dari **administrasi negara**. Istilah *governance* dapat dan telah digunakan dalam berbagai konteks, seperti *good corporate governance*, *local governance*, serta *public governance* (sebagai pengganti istilah *public administration*). Ada pula yang memberikan pengertian *governance* sebagai proses kegiatan bersama-sama dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam “*good governance*”, misalnya terkandung makna *sharing/partnership* pengelolaan negara antar sektor publik, yaitu Negara/Pemerintah, swasta/dunia

usaha dan masyarakat. Dengan perkataan lain, *governance* yang baik ditandai dengan hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara ketiga pihak tersebut, yang oleh kalangan pakar disebut sebagai pilar-pilar *good governance*. Dengan demikian, dalam *governance* terlibat segenap pelaku, yaitu keseluruhan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), yang pada dasarnya terdiri atas Negara/Pemerintah, pemerintahannya, *stakeholders* masyarakat meliputi kalangan yang sangat luas dan beraneka ragam, seperti organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), koperasi, individu dan bahkan lembaga-lembaga internasional.

Dalam *public governance* peran sektor Negara/Pemerintah, bukan hanya sebagai pemberi layanan barang dan jasa, melainkan lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu paradigma utama dalam *good governance* adalah pemberdayaan masyarakat. Hal ini berarti gagasan Osborne dan Gaebler

melalui "*empowering rather than serving*" menjadi semangat yang perlu ditumbuhkan di kalangan aparat pemerintah, karena keberdayaan masyarakat akan mengurangi beban pemerintah daerah pada saat ketersediaan sumber-sumber publik semakin langka. Dengan demikian pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah akan menjadi lebih efektif, karena masyarakat memiliki kontrol yang lebih besar, masyarakat memahami permasalahan lebih baik, dan usaha pemberian pelayanan dari masyarakat diharapkan lebih murah dibandingkan dengan usaha profesional. Dengan demikian mendorong daya saing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dengan meningkatkan efisiensi, lebih bersifat responsif dan merangsang inovasi dan gairah kerja aparat pemerintah.

Berdasarkan hal itu, dalam versi *World Bank* yang mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan administrasi pembangunan dalam proses penyelenggaraan politik, administratif serta penciptaan *legal* dan *political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas

kewirausahaan, *good governance* memiliki karakteristik nilai-nilai sebagai berikut :

1. *Participation*, dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berserikat, berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif;
2. *Rule of Law*, harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif, serta menghormati Hak Asasi Manusia;
3. *Transparency*, yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, mengakibatkan proses kegiatan lembaga dan informasinya dapat diterima secara langsung oleh pihak yang membutuhkan. Dalam hal ini informasi tersebut harus dapat dipahami dan dimonitor;
4. *Responsiveness*, dimana setiap lembaga dan proses

kegiatannya harus melayani setiap *stakeholders*;

5. *Consensus Oriented*, yaitu *good governance* menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur;
6. *Equity*, dimana semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau memelihara kesejahteraannya;
7. *Effectiveness and efficiency*, dimana setiap proses dan lembaga menghasilkan produk tertentu sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin;
8. *Accountability*, yaitu para pengambil keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini berbeda-beda tergantung pada

organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah merupakan keputusan internal atau eksternal;

9. *Strategic vision*, yaitu para pemimpin publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan pembangunan.

(LAN RI, 2006 : 6-7)

Kesembilan karakteristik di atas saling memperkuat dan tidak berdiri sendiri untuk menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas SDM aparatur; serta sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

### **Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Perkembangan CSR tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan

berkelanjutan (*sustainability development*). Definisi pembangunan berkelanjutan menurut *The World Commission in Environment and Development* yang lebih dikenal dengan *The Brundtland Commission*, adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka.

*The Brundtland Commission* dibentuk untuk menanggapi keprihatinan yang semakin meningkat dari para pemimpin dunia, menyangkut peningkatan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang semakin cepat. Selain itu komisi ini juga dibentuk untuk mencermati dampak kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam terhadap ekonomi dan pembangunan sosial. Oleh karenanya, konsep *Sustainability Development* dibangun di atas tiga pilar yang berhubungan dan saling mendukung satu dengan lainnya. Ketiga pilar tersebut adalah sosial, ekonomi dan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam *The United Nations 2005 World Summit Outcome Document* (Solihin : 2009).

Pengenalan konsep Sustainability Development memberikan dampak kepada perkembangan definisi dan konsep CSR selanjutnya. Sebagai contoh, *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) merumuskan CSR sebagai kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan, serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan juga harus memberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Lembaga lain yang memberikan rumusan CSR sejalan dengan konsep *Sustainability Development* adalah *The World Business Council for Sustainability Development* (WBCSD). Menurut organisasi ini, CSR adalah komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi. Pada saat yang sama meningkatkan kualitas

hidup dari para pekerja dan keluarganya, demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas.

Menurut World Bank (Fox, Ward dan Howard 2002 : 1), CSR merupakan komitmen sektor swasta untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dukungan sektor swasta dalam hal ini perusahaan untuk melakukan tanggungjawab sosial, dimulai ketika tahun 2000, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) membentuk *UN Global Compact* sebagai salah satu lembaga yang merangkai konsep dan kegiatan CSR. Lembaga ini merupakan representasi kerangka kerja sektor swasta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan terciptanya *Good Corporate Citizenship* (UN Global Compact : 10). Tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberantas kemiskinan, menyelesaikan masalah buta huruf, memperbaiki pelayanan kesehatan, mengurangi angka kematian bayi, memberantas AIDS, menciptakan keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan, dan

merangsang terciptanya kemitraan dalam proses pembangunan.

Selanjutnya, tujuan CSR didasarkan pada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional perusahaan, sebagaimana dikemukakan Wibisono (2007), yaitu :

1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.
2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme untuk

mendapatkan dukungan dari masyarakat. Wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa.

3. Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Sementara ruang lingkup CSR dalam pencapaian tujuan di atas adalah bahwa pada dasarnya CSR bukanlah entitas departemen atau divisi yang sifatnya parsial, atau hanya berfungsi dalam pendongkrakan citra sebagai bagian dari jurus jitu marketing perusahaan, sehingga nilai perusahaan di mata stakeholders lain khususnya masyarakat menjadi positif.

Pada hakikatnya CSR adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum, dikarenakan CSR menjadi pijakan

komprehensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan. Tidak etis jika nilai CSR hanya diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat setempat, di sisi lain kesejahteraan karyawan yang ada didalamnya tidak terjamin, atau perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktik korupsi dan kolusi, atau mempekerjakan anak.

Dalam aspek lingkungan misalnya, terdapat perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dalam pencemaran terhadap alam, melakukan pemborosan energi, dan bermasalah dalam limbah. Bagaimanapun semua aspek dalam perusahaan, baik ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan tidak bisa lepas dari koridor tanggung jawab sosial perusahaan. Oleh karena itu dalam CSR tercakup di dalamnya empat landasan pokok yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan (Tanari, 2009), yaitu :

1. Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi, meliputi :
  - Kinerja keuangan berjalan baik
  - Investasi modal berjalan sehat

- Kepatuhan dalam pembayaran pajak
  - Tidak terdapat praktik suap/korupsi
  - Tidak ada konflik kepentingan
  - Tidak dalam keadaan mendukung rezim yang korup
  - Menghargai hak atas kemampuan intelektual/paten
  - Tidak melakukan sumbangan politis/lobi.
2. Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup, meliputi :
    - Tidak melakukan pencemaran
    - Tidak berkontribusi dalam perubahan iklim
    - Tidak berkontribusi atas limbah
    - Tidak melakukan praktik pemborosan air
    - Tidak melakukan penyerobotan lahan
    - Tidak berkontribusi dalam kebisingan
    - Menjaga keanekaragaman hayati.
  3. Landasan pokok CSR dalam isu sosial, meliputi :
    - Menjamin kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak
    - Tidak mempekerjakan anak

- Memberikan dampak positif terhadap masyarakat
  - Melakukan proteksi konsumen
  - Menjunjung keberanekaragaman
  - Menjaga privasi
  - Melakukan praktik kerja sesuai dengan kebutuhan
  - Bertanggung jawab dalam *proses outsourcing* dan *off-shoring*
  - Akses untuk memperoleh barang-barang tertentu dengan harga wajar.
4. Landasan pokok CSR dalam isu kesejahteraan, meliputi :
- Memberikan kompensasi terhadap karyawan
  - Memanfaatkan subsidi dan kemudahan yang diberikan pemerintah
  - Menjaga kesehatan karyawan
  - Menjaga keamanan kondisi tempat kerja
  - Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja
  - Menjaga keseimbangan kerja/hidup.

Landasan di atas memberikan sebuah gambaran bahwa CSR bukanlah

hal yang parsial, melainkan suatu urusan yang komprehensif. Tidak tepat jika perusahaan hanya fokus pada aspek lingkungan hidup, namun abai dalam aspek kesejahteraan karyawan dan ketidakseimbangan antar aspek lainnya. Oleh karena itu, poin-poin di atas bisa dijadikan sebagai indikator sejauhmana keseriusan perusahaan dalam menerapkan CSR.

### **Konsep Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah yang cukup merisaukan banyak orang. Dianggap sebagai penyakit sosial yang paling dahsyat dan menjadi musuh utama kepada rancangan pembangunan negara (Hairi Abdullah, 1984:16). Dan Kemiskinan bukan saja dilihat sebagai fenomena ekonomi semata-mata, tetapi juga sebagai masalah sosial dan politik (Syed Othman Alhabshi, 1996: 35). Pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Namun begitu, kemiskinan tidak dapat dihapuskan secara total. Dari masa ke masa, kemiskinan terus mewujud dan usaha mengatasinya pun terus menerus dilaksanakan dan berbagai kebijakan

pun telah diambil, semuanya untuk kemiskinan. Tetapi, kemiskinan tetap menggurita dan menjadi kanker yang terus menerus menghisap dan menggerus tubuh kemiskinan itu.

Dalam konteks yang demikian, maka untuk memahami kemiskinan dapat dilihat dari pandangan Sudibyo, (1995:11) bahwa kemiskinan adalah kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, kesehatan dan pendidikan dasar. Pandangan serupa dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Sedangkan dari BKKBN (1996:10) kemiskinan dianggap sebagai Suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup

memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Lebih lanjut kriteria kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi salah satu tolak ukur penentuan masyarakat miskin, yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah

- kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
  9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
  10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
  11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
  12. Pendidikan tertinggi kepala kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
  13. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
  14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Terkait dengan hal itu, Nasikun (1995) kemudian merangkum secara lengkap pengertian kemiskinan dengan menyatakan bahwa kemiskinan adalah :

Sebuah fenomena multifaset, multi dimensional, dan terpadu.

Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lain: informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kapital. Lebih dari itu, hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap”.

Disamping pandangan ahli yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa ahli juga memetakan penyebab kemiskinan dalam 3 (tiga) kategori yaitu kemiskinan natural,

kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural dapat dikatakan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan alamiah baik pada segi sumberdaya manusianya maupun sumberdaya alamnya atau *kemiskinan konsekuensial* meminjam istilah David Cox (dalam Suharto 2004:132), namun, Galbraith (1979:13) menganggap faktor-faktor alamiah kurang bisa dijadikan penjelasan mengenai terjadinya kemiskinan. Ia menunjuk Jepang, Singapura, Taiwan, Hongkong dan Korsel sebagai bukti. Secara alamiah negara-negara tersebut bukanlah negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun demikian, dalam kenyataannya, kelima negara di atas tidak termasuk negara miskin. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor kebudayaan, yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan didalam masyarakat itu. (Suharto, 2004:137; Baswir, 1995:20; Mas'ood 1994:135). Kemiskinan model ini menurut Oscar Lewis dapat muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya atau faktor internal yang datang dari diri si miskin itu sendiri.

(Suharto, 2004:138). Pandangan tersebut oleh Chambers (1988:132) dianggap sebagian besar melesat, karena banyak studi kasus yang menunjukkan bahwa orang-orang miskin pekerja keras, cerdas, dan ulet. Mereka harus memiliki sifat-sifat seperti itu untuk dapat bertahan hidup dan melepaskan diri dari belenggu rantai kemiskinan.

Selanjutnya kemiskinan Struktural menurut Saefullah (2007: 53) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya. Sedangkan Bagi kelompok *agrarian populism* (Sutrisno, 1995:18) pengaturan institusi (*institutional arrangements*) atau campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan menjadi penyebab kemiskinan itu. Bagi kelompok ini orang miskin dianggap mampu membangun diri sendiri apabila pemerintah mau memberi kebebasan bagi mereka untuk mengatur diri sendiri dalam bentuk *empowerment*.

Berkaitan dengan pandangan tersebut, maka Friedman (dalam Suharto, 2005:134) memandang kemiskinan, karena berkaitan dengan ketidaksamaan kesempatan dalam

mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi (1). Modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan; (2). Sumber keuangan (pekerjaan, kredit); (3). Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial); (4). Jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang dan jasa; (5). Pengetahuan dan keterampilan; dan (6). Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup.

Untuk mengeluarkan mereka dari kondisi seperti itu diperlukan kebijakan publik, persoalannya kendala yang sangat besar dalam pelayanan publik ialah adanya perbedaan sosial ekonomi antara masyarakat yang beragam dan kemampuan birokrasi pemerintahan. Karena itu, menurut Supriatna, (1997:37) bahwa pemerintah dalam melakukan pelayanan publiknya harus memperhatikan kondisi lokal, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan kelompok sasaran masyarakat. Inti dasar pelayanan ini terletak pada proses kebijakan publik dan operasionalisasinya.

Kebijakan publik yang diperlukan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga kebijakan yang bersifat jangka panjang sebagaimana dikemukakan oleh Saefullah (2007:60) bahwa dalam hal pengentasan kemiskinan diperlukan kebijakan yang bersifat jangka pendek maupun kebijakan bersifat jangka panjang yaitu:

1. Kebijakan jangka pendek dengan memberikan bantuan kebutuhan hidup sehari-hari secara minimal pada hakekatnya hanya bersifat sementara karena kalau bantuan itu habis maka penduduk yang diberi bantuan akan kembali hidup dalam kemiskinan.
2. Kebijakan jangka panjang ini menyangkut dua aspek utama. *Pertama*, pengembalian sikap mental untuk bekerja dan kebanggaan memperoleh penghasilan dari hasil keringatnya sendiri. Aspek ini meliputi pemberian pendidikan keahlian untuk membangun jiwa wiraswasta, perluasan lapangan kerja, realisasi wajib belajar dengan anggaran penuh pemerintah, penanaman disiplin untuk menjaga kesehatan lingkungan, penataan sanitasi dan sumber air bersih, sistem keamanan yang dapat menangkal kejahatan dalam kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya. Secara konseptual kebijakan jangka panjang

bukan hanya terbatas memenuhi kebutuhan fisiologis sehingga bukan hanya mengatasi kebutuhan material tetapi juga kebutuhan spiritual yang berisi rasa aman, tenteram dan terhindar dari rasa takut. *Kedua*, yang memang tidak mudah dilakukan karena menyangkut perubahan sistem secara menyeluruh....perubahan sistem harus dimulai dengan keinginan bersama untuk melakukan penertiban dan penataan di segala bidang kehidupan. .... Oleh karena itu kalau betul-betul ingin mengentaskan kemiskinan di Indonesia perlu melakukan perubahan struktur sosial ekonomi secara komprehensif. Sedangkan pembuatan kebijakannya itu sendiri harus berorientasikan kepada kepentingan publik.

Bagaimanapun juga penanganan kemiskinan tidaklah mudah, karena sangat *complicated* dan berdimensi sangat luas, sehingga upaya penanganannya pun sulit, telah berbagai kebijakan publik dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan, namun sampai saat ini warga miskin tetap melalui pendakian panjang untuk mencapai harapan hidup yang lebih berharga dan bermartabat dalam kehidupan sosialnya. Dan kebijakan pemberdayaan kemiskinan menjadi

tumpuan akhir, tidak saja bagi masyarakat miskin tetapi juga bagi pemerintah.

### **Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat**

Arus utama kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan, ujungnya adalah mengarah pada *Pemberdayaan Masyarakat (empowerment)*, dimana Strategi pengentasan masyarakat miskin menurut Dwiyanto (1995:4) tidak lagi hanya berorientasi pada kesejahteraan (*welfare oriented strategy*) melalui *delivered development* belaka tetapi lebih difokuskan pada upaya *empowerment* atau pemberdayaan masyarakat. Model pengentasan kemiskinan yang demikian tidak lagi mengarah pada *charity strategy*, karena strategi seperti ini lebih berorientasi *Assistencialism*, (Freire, 1974 dalam Moelyarto, 1995:24) yang memandang masyarakat sebagai objek asistensi atau objek bantuan dalam pelbagai pelayanan dan pemberian fasilitas sosial. Hal ini makin memperbesar tingkat ketergantungan masyarakat kepada pemerintah yang merendahkan martabat kemanusiaan,

dimana pemerintah malah menciptakan pengemis baru.

Masalah kemanusiaan inilah yang menjadi inti dasar dari pemberdayaan, sebagaimana dikemukakan Sumodiningrat (1999:44) bahwa pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pendekatan pemberdayaan yang lebih berpusat kepada manusia memungkinkan masyarakat mengembangkan potensi dirinya. Penciptaan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*), upaya memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dan perlindungan (Sumodiningrat,1999:44). Pandangan demikian didukung dalam pendekatan pengelolaan sumber yang bertumpu pada komunitas (*community based resource management*) dari Korten (dalam Moeljarto 1995: 26) dengan ciri-ciri pendekatan adalah:

1. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan di masyarakat sendiri.
2. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.
3. Pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya amat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.
4. Didalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini pada proses *social learning* yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan

mendasarkan pada saling belajar.

5. Proses pembentukan jaringan (networking) untuk birokrat dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola pelbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antar struktur vertikal dan horizontal. Melalui proses networking ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Proses pemberdayaan mempunyai kecenderungan yaitu menekankan pada proses pemberian kekuatan kepada masyarakat lain untuk dapat lebih berdaya. Atau Pemberdayaan adalah suatu cara

memberikan kekuatan kepada masyarakat yang powerles agar ikut serta dalam proses pembangunan sebagai proses aktualisasi eksistensi (Pranarka dan Moeljarto, 1996:17). Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan pula menurut Suhendra (2006:75) bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya.

Pemberdayaan, masyarakat memiliki otonomi atas dirinya sehingga mampu meningkatkan potensi yang dimilikinya. Sebagaimana dikemukakan Suwaryo (2005: 430) bahwa Jiwa otonomi itu harus dimulai dari individu-individu masyarakat, diwujudkan dalam bentuk partisipasi dan mengembangkan pola kemandirian dalam profesi masing-masing individu masyarakat. Selanjutnya dikatakan bahwa Otonomi yang berorientasi kepada pemberdayaan daerah dan masyarakat dan otonomi yang berorientasi kepada

*scientific Government* (orientasi kepada aspirasi dan empiris sumberdaya).

Ife (1995:61-64) pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup; kemampuan dalam memuat keputusan –keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan; kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga-lembaga; kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
5. sumber-sumber; kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal,

informal dan kemasyarakatan.

6. aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi; kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil) (Soeharto,2005:60 ) selanjutnya dikatakan bahwa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian,masyarakat terasing.

3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan atau keluarga.

Ketidakberdayaan ini diperparah lagi oleh karena masyarakat di lingkungan mereka telah menciptakan pandangan lain dari yang umum sehingga kerap kali dianggap sebagai deviant (penyimpang). Mereka kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan mereka menurut Suharto (2005:61) seringkali merupakan akibat dari adanya kekurangadilan dan diskriminasi dalam aspek kehidupan tertentu. Oleh karena itu para teoritis, baik Seeman (1985), Seligman (1972) dan Learner (1986) meyakini bahwa ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah, dan tidak berdaya, karena masyarakat memang menganggapnya demikian, yang oleh Seeman diistilahkan sebagai “alienasi” (Suharto,2005:61).

Untuk mengeluarkan mereka dari kondisi keteralienasian diperlukan strategi pemberdayaan, dimana pada umumnya dilakukan secara kolektif. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan dengan kolektivitas. Dan untuk membangun strategi pemberdayaan menurut Dubois dan Miley (1992:211) digunakan beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Membangun relasi pertolongan yang (a) merefleksikan respon empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self determination); (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu (d) menekankan kerjasama klien.
2. Membangun kebijakan yang : (a) menghormati martabat dan harga diri klien (b) mempertimbangkan keberagaman individu (c) berfokus pada klien (d) menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah (a) Memperkuat partisipasi klien dalam

semua aspek proses pemecahan masalah (b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.

4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: ketaatan terhadap kode etik profesi (b) keterlibatan dalam pengembangan professional riset dan perumusan kebijaksanaan; (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik (d) Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

Telah diuraikan sebelumnya bahwa pemberdayaan merupakan salah satu pembuka kunci bagi pengentasan kemiskinan, namun untuk membukanya diperlukan strategi partisipatif dalam pelaksanaannya, sebab tanpa partisipasi dari mereka yang hendak diberdayakan, maka amat sulit suatu program terlaksana dengan baik. Program itu boleh jadi dapat dilaksanakan, ataukah program itu sangat jadi tercapai tujuannya, namun apakah kemudian program itu dapat mencapai tujuan utama dari

pemberdayaan, tentu saja akan menyisakan banyak pertanyaan jika tanpa partisipasi dari masyarakat yang hendak diberdayakan.

Dalam bukunya Kartasasmita (1997:56) menulis bahwa dari Studi empirik banyak menunjukkan kegagalan pembangunan, atau pembangunan tidak mencapai sasaran, karena kurangnya *partisipasi rakyat*. Lebih lanjut Kartasasmita menyatakan bahwa keadaan itu dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain.

1. Pembangunan hanya menguntungkan rakyat banyak, bahkan pada sisi ekstrim dirasakan merugikan.
2. Pembangunan meskipun dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat kurang memahami maksud itu,
3. pembangunan dimaksudkan untuk menguntungkan rakyat, dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan pemahaman itu.
4. Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat, tetapi sejak semula rakyat tidak diikutsertakan.

Dalam konteks yang demikian adalah menarik jika terlebih dahulu diurai pemikiran dari Mubyarto (1984:43) tentang Partisipasi yang mengandung arti keterlibatan seseorang atau sekelompok orang secara mental emosional atau fisik dalam situasi kelompok tertentu, yang mendorongnya untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan kelompok tersebut serta ikut bertanggungjawab atasnya (baik secara individual atau kolektif, maupun secara vertikal atau horizontal). Pemikiran ini kemudian sejalan dengan pemikiran dari Syarwani (1987:65) bahwa partisipasi pada hakekatnya berarti ikut sertanya suatu kesatuan atau kelompok orang dalam suatu aktivitas kolektif yang diselenggarakan oleh suatu tatanan yang lebih besar. Selanjutnya Koentjaraningrat (1981:80) menyatakan bahwa partisipasi menyangkut dua pola yang pada dasarnya berbeda yaitu: (1) partisipasi dalam kegiatan-kegiatan bersama-sama dalam proyek pembangunan; dan (2) partisipasi sebagai individu di luar kegiatan bersama dalam pembangunan. Dari pandangan

tersebut, jika dikaitkan dalam konteks pembangunan, maka partisipasi mengandung arti menurut Slamet (2003:8) yaitu :

1. Ikut memberi input proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya.
2. Ikut memberi input dan menikmati hasilnya.
3. Ikut memberi input dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung.
4. Memberi input tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya

Lebih lanjut Ndraha (1987:103) menguraikan bahwa ada beberapa bentuk atau tahap dalam partisipasi yaitu :

1. Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
2. Pemberdayaan.
3. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima ( mentaati, memenuhi, melaksanakan ) mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.

4. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana. Perasaan terlibat dalam merencanakan perlu ditumbuhkan sedini mungkin didalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka dan pemberdayaan dalam hal yang bersifat teknis.
5. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;
6. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
7. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya Conyers (1991:154-155) mengemukakan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting.

*Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap

masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program atau proyek tersebut akan mempunyai rasa memiliki. *Ketiga*, merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Dalam kaitan dengan pemberdayaan menunjukkan bahwa pemberdayaan dalam kerangka meningkatkan taraf hidup kaum miskin diperlukan keterlibatan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan. Pembangunan yang berpusat pada rakyat menunjukkan masyarakat selaku pemegang peran utama dalam pembangunan sebagaimana dikatakan oleh Hikmat (2006: 128-129) bahwa :

Melalui reformulasi pembangunan peluang bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif aktif dapat diwujudkan. Dalam pembangunan yang partisipatif, *pemberdayaan* merupakan

salah satu strategi yang dianggap paling tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi. Upaya lain untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah *partisipasi aktif masyarakat* melalui gerakan massif. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan "hanya" merupakan tanggungjawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan mereka memiliki empati yang dalam yang dibangun dari prinsip *silih asih, silih asuh, dan silih asah*.

Dengan demikian, maka dalam kerangka pemberdayaan masyarakat miskin, melibatkan masyarakat secara langsung dalam berbagai bentuk kegiatan sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan, menunjukkan apresiasi pemerintah terhadap kemampuan masyarakat miskin untuk memberdayakan dirinya. Sebab pada dasarnya manusia memiliki kemampuan dan potensi untuk dikembangkan dalam mengelola diri dan lingkungannya. Dengan kebijakan yang berparadigma keberfungsian

sosial, maka titik perhatian terletak pada apa yang dimiliki oleh orang miskin, bukan pada apa yang tidak dimiliki orang miskin, sehingga keberdayaan kaum miskin dapat diapresiasi tidak saja dari sisi potensi ekonomi, tetapi juga dalam peningkatan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya.

## PEMBAHASAN

### **Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat Sipil (*Civil Society*) Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon**

*Corporate Social Responsibility* sangat erat hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan, diartikan sebagai proses pembangunan (lahan kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan". Salah satu faktor yang harus dihadapi dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan

pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global yang harus dipahami dan diimplementasikan pada tingkat lokal. Pembangunan berkelanjutan sering dipahami hanya sebagai isu-isu lingkungan. Lebih dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup sinergi tiga elemen kebijakan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan yang digambarkan oleh John Elkington dalam *triple bottom line*, yaitu “orang, planet, dan keuntungan” yang merupakan tujuan pembangunan. Maksudnya bahwa *Sustainable development* pengembangan berkelanjutan harus didukung oleh komitmen yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan terdiri dari: 1) Ekonomi profit, adalah bentuk tanggung jawab perusahaan pada pemegang saham, yakni profit; 2) Lingkungan planet, merupakan tanggung jawab perusahaan agar menjaga kemampuan lingkungan dalam mendukung keberlanjutan kehidupan bagi generasi berikutnya; 3) Sosial People, dimaksudkan bahwa

kehadiran perusahaan harus memberikan manfaat pada *stakeholder* dan masyarakat secara luas.

Konsep *triple bottom line* perlu dikembangkan dan diperluas hingga menjadi kegiatan CSR yang benar-benar *sustainable*. Selain itu, program CSR baru dapat berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Namun dalam implementasi CSR, dilakukan menggunakan metode yang berbeda-beda. Implementasi yang dilakukan dapat menggunakan model *charity* atau pemberdayaan. Perusahaan yang menggunakan model *charity* hanya berpatok sekadar menghabiskan anggaran dan menafikkan kebutuhan masyarakat. Model *charity* mendapat kritikan karena model tersebut hanya menjadi candu bagi masyarakat dan membuat masyarakat tergantung serta tidak berdaya.

*Cilegon Corporate Social Responsibility* (CCSR) adalah lembaga fasilitator yang akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para

perusahaan/dunia usaha di Kota Cilegon, sehingga berkomitmen untuk berjalan seiring-sejalan dengan Pemerintah Kota Cilegon dalam mengurangi permasalahan sosial dan lingkungan. Program dilakukan dengan model kemitraan bina lingkungan (PKBL) sebagai bagian dari strategi bisnis guna mencapai profitabilitas dan sustainabilitas yang maksimal. Maksud pendirian CCSR adalah terbentuknya suatu lembaga independent dan professional. CCSR sebagai mitra pemerintah dan dunia usaha, dalam rangka implementasi program CSR dari perusahaan-perusahaan yang terdapat di wilayah Cilegon. Saat ini CCSR berkantor di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Cilegon-Banten, Telp : (0254) 381769, Fax (0254) 381769, Email : Cilegon\_csr@yahoo.co.id.

Tujuan Pendirian CCSR adalah membangun dan mengembangkan pola kerjasama PEMDA Kota Cilegon dan dunia usaha. Memetakan dan distribusi implementasi CSR yang transparan dan professional. Meningkatkan daya dukung yang *stakeholder* dalam penanggulangan dampak sosial pembangunan, mendukung

peningkatan mutu pendidikan, meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan dan ketenagaan, mengembangkan konsep partisipatif dalam melaksanakan pembangunan dan mendorong penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sedangkan visinya adalah mitra pemerintah dan dunia usaha, dengan misinya sinkronisasi, integrasi dan fasilitasi dunia usaha.

Kepengurusan CCSR Periode 2011-2013 terdiri dari unsur BUMN, BUMD, Tokoh Masyarakat dan Pengusaha.

Selanjutnya Program-program prioritas CCSR adalah :

1. Bantuan Buku Paket Sekolah yang di Ujian Akhir Nasional kan, untuk SMP, SMA, SMK Negeri di Kota Cilegon (Penyandang Bantuan Bank Jabar Cabang Cilegon, PT. KS (Persero) Tbk., PT. Chandra Astri Petrochemical, Forum BUMD Kota Cilegon (PT. BPRS Cilegon Mandiri, PT. PCM, PDAM Cilegon Mandiri).
2. Pembuatan Jamban Keluarga
3. Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (1 Milyar/Kecamatan)
5. Listrik Masuk Desa
6. Bank Sampah, Rencana Pilot Project dilaksanakan di Perumahan Umum (Perum) Cibeber Cilegon.
7. Bantuan Kacamata.

**Berikut adalah Tabel 3.1. Rekapitulasi Nilai Bantuan Program CCSR Tahun 2011**

No.	Tgl	Perjanjian Kerjasama	Program	Nilai
1.	5/06/2011	PT Krakatau Steel dengan CCSR	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) 1 Milyard/Kecamatan	Rp. 1,598,200,000,-
2.	20/07/2011	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dengan CCSR	Pengadaan Buku Paket Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Cilegon	Rp. 458,459,000,-
3.	20/10/2011	PT Krakatau Steel dengan CCSR	Pengadaan Buku Paket SMA DAN SMK	Rp. 248,000,000,-
4.	20/10/2011	PT Krakatau Steel dengan CCSR	Program Jambanisasi 120 Unit	Rp. 300,000,000,-
5.	25/11/2011	PT Chandra Asri Petrochemical dengan CCSR	Pengadaan Buku Paket Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Cilegon	Rp. 209,000,000,-
6.	29/11/2011	PT Chandra Asri Petrochemical dengan CCSR	Program Jambanisasi 20 unit	Rp. 50.000.000,-
7.	20/11/2011	BJB dengan Cilegon CCSR	Program Jambanisasi Keluarga 53 unit Dan Semenisasi 44 Rumah	Rp. 332.500,000,-
8.	25/11/2011	Forum BUMD dengan CCSR	Bantuan Buku Paket Untuk SMA	Rp. 138,000,000,-
9.	20/12/2011	PT. KIMIA FARMA Dengan CCSR	Pemeriksaan mata 358 siswa dan Pemberian Kacamata 100 Siswa Sekolah Dasar Di Cilegon,	Rp. 50,000,000,-

**Sumber** : Divisi Keuangan dan Pelaporan CCSR, 2013.

Terdapat tiga Model Kerja CCSR yang

### (1) Model Kerja 1

Perusahaan → Masyarakat

Dalam model ini CSR dapat dilakukan masing-masing perusahaan-perusahaan. Perusahaan melakukan kegiatan CSR yang langsung ditujukan kepada masyarakat. Peran CCSR melakukan dokumentasi dan publikasi kegiatan yang telah dilakukan tersebut.

Kelebihan Model Kerja I :

1. Perusahaan independen dalam menyalurkan dana CSR
2. Penyaluran dana CSR sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Kelemahan Model Kerja I :

1. Program CSR perusahaan tumpang tindih dengan program Pemerintah Kota Cilegon
2. Penerima dana CSR dimungkinkan hanya untuk masyarakat sekitar perusahaan
3. Penyelarasan program secara terpadu dan terukur sulit dilakukan
4. Sulit terjadi pemerataan pelaksanaan program CSR.

### (2) Model Kerja II

telah dilakukan, yaitu :

Perusahaan → CCSR,

CCSR, Mencatat dan Mempublikasikan  
Masyarakat

Dalam model ini kegiatan CSR perusahaan dilakukan melalui CCSR, untuk kemudian disalurkan ke masyarakat.

Kelebihan Model Kerja II :

Program dana CSR yang dikelola oleh CCSR dapat disinkronkan dengan program PEMKOT Cilegon. Penerima manfaat dapat lebih luas, partisipasi perusahaan dalam program CSR dapat sinergis dan terdokumentasi dengan baik.

Kelemahan Model Kerja II :

Penyaluran dana CSR sesuai dengan program CCSR dimungkinkan tidak sesuai dengan program jangka panjang yang telah disusun perusahaan.

### (3) Model Kerja III

Perusahaan ↔ CCSR,  
menawarkan kegiatan CCSR  
Masyarakat

Dalam Model ini CCSR menawarkan beberapa proposal

kegiatan CSR kepada perusahaan. Secara lengkap dalam model ini, pada awalnya masyarakat mengajukan proposal kepada CCSR, kemudian CCSR akan memilih proposal yang paling layak atau paling baik untuk dilaksanakan. Setelah ditentukan proposal mana saja yang layak dapat didanai, maka CCSR akan membawa proposal tersebut ke korporat untuk didanai.

Kelebihan Model Kerja III :

Dimungkinkan karena datang dari masyarakat, program CSR yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kelebihan Model III :

Tidak semua proposal yang masuk ke CCSR dapat diimplementasikan, karena keputusan akhir ada di korporat, dan sulit terjadi pemerataan program CSR secara komprehensif dan terukur.

## **KESIMPULAN**

Sinergitas Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat Sipil (*Civil Society*) Melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) Dalam Program

Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon merupakan komitmen bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan di Kota Cilegon. Sinergitas program ini akan berguna untuk membantu perusahaan dalam memperbaiki *financial performance* dan akses pada modal, meningkatkan *corporate image* dan penjualan/layanan jasa, memelihara kualitas kerja, memperbaiki keputusan pada isu-isu kritis, serta menangani resiko secara lebih efisien dan mengurangi biaya jangka panjang.

CSR adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan berada. Dengan dukungan berbagai *stakeholder* pada ranah ekonomi, sosial dan lingkungan, yang diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan. Sumber pendanaannya dihasilkan dari kemitraan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil (*civil society*) berdasarkan kesepakatan-kesepakatan

yang dibangun bersama, untuk kepentingan ke depan dalam jangka panjang yang lebih baik. Sebagai outputnya adalah pemberdayaan masyarakat Cilegon dalam pengentasan kemiskinan melalui kerangka *good corporate governance*.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran berupa rekomendasi berikut :

1. Sinergitas program kemitraan CSR dalam penanganan masalah-masalah lingkungan sebagai dampak operasional perusahaan harus memperhatikan biofisik lingkungan hidup, yang memberi daya dukung alam pada kehidupan. Dengan demikian, program perusahaan di bidang lingkungan harus mempunyai kaitan yang kuat dan kontekstual dengan pengembangan sosial ekonomi.
2. Sinergitas program kemitraan CSR dalam penanganan masalah-masalah ekonomi masyarakat, dilakukan dengan strategi pengembangan kualitas dan kapasitas masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun

lingkungan dalam pengembangan pembangunan berkelanjutan.

3. Sinergitas program kemitraan CSR dalam penanganan-penanganan masalah-masalah sosial, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, dilakukan dengan dengan penciptaan lapangan kerja alternatif melalui peningkatan pendidikan dan pengembangan ekonomi masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta : LP3ES
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Terjemahan: Susetiawan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. 1995. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Gilbraith, Jhon Kenneth. 1979. *Hakekat Kemiskinan Massa*, (Terj. Tom Anwar). Jakarta : Sinar harapan.
- Hairi Abdullah, ed. 1984. *Kemiskinan dan Kehidupan Golongan Berpendapatan Rendah*. Bangi

- : Penerbit Universiti  
Kebangsaan Malaysia.
- Hikmat, Hary. 2006. *Strategi  
Pemberdayaan Masyarakat*.  
Bandung: Humaniora.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997.  
*Administrasi Pembangunan*.  
Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Pembangunan  
Untuk Rakyat , Memadukan  
Pertumbuhan dan Pemerataan*.  
Jakarta : Pustaka Cidesindo.
- Koentjaraningrat. 1980. *Kebudayaan  
Mentalitet dan Pembangunan*.  
Jakarta: Gramedia.
- Lako, Andreas. 2011. *Dekonstruksi  
CSR & Reformasi Paradigma  
Bisnis & Akuntansi*. Jakarta :  
Erlangga.
- Lembaga Administrasi Negara  
Republik Indonesia. 2006.  
*Sistem Administrasi Negara  
Kesatuan Republik Indonesia*.  
Jakarta : LAN RI.
- Moeljarto. 1995. *Politik  
Pembangunan, Sebuah Analisis  
Konsep, arah dan Strategi*.  
Yogyakarta: Tiara Wacana  
Yogya.
- Mubyarto. 1984. *Strategi  
pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta :  
P3KP-UGM.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987,  
*Pembangunan Masyarakat  
Mempersiapkan Masyarakat  
Tinggal Landas*, Jakarta: Bina  
Aksara
- Pranarka dan Vidhyandika M. dalam  
Onny.SP dan AMW.Pranarka  
(ed) 1996 *Pemberdayaan*.  
Jakarta:CSIS.
- Rachman, Nurdizal M, Asep Efendi,  
Emir Wicaksana. 2011.  
*Panduan Lengkap  
Perencanaan Corporate Social  
Responsibility*. Jakarta :  
Penebar Swadaya.
- Rahmatullah dan Trianitas Kurniati.  
2011. *Panduan Praktis  
Pengelolaan CSR (Corporate  
Social Responsibility)*.  
Yogyakarta : Samudra Biru.
- Saefullah, Djadja. 2007, *Pemikiran  
Kontemporer Administrasi  
Publik (Perspektif Manajemen  
Sumberdaya Manusia Dalam  
Era Desentralisasi*. Jakarta  
:LP3AN.
- Soetrisno, Lukman. 1995. *Menuju  
Masyarakat Partisipatif* .  
Jakarta : Kanisius.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate  
Social Responsibility : From  
Charity to Sustainability*.  
Jakarta : PT. Salemba Empat.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan  
Publik*. Bandung : Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Refika Aditama

Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Alfabeta

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta : Gramedia.

Syarwani, Abdullah. 1987. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Alternatif Cara Menuju Keswadayaan dalam Menatap Masalah Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia (LKMI).

Syed Othman Alhabshi. 1996. "Poverty Eradication From Islamic Perspectives", <http://vlib.unitark11.edu.my/staff-publications/datuk>, layari pada Ogos 2000.

Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik : Fascho Publishing.

### **Dokumen/Makalah/Jurnal**

*Guidance On Social Responsibility*. 2008. *Document ISO 26000*.

Hikmat, Hary. 2003, *Marginalisasi komunitas Local dalam Perspektif Kontingensi Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (studi kasus di kota Bekasi, Disertasi, UNPAD: Bandung.

Tanari, Adrianus. 2009. *Materi Training CSR as per ISO 26000*. Jakarta : Valueconsult.

Suwaryo, Utang. 2005, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Studi Kasus tentang kewenangan dalam aplikasi otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 di Kota Bandung*, Disertasi, UNPAD: Bandung .